

KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Tuhan YME, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019 –2024. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), dengan Negara Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor.

Bogor, 26 Februari 2021

Kepala,


Drs. Hanafi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 198801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor	1
B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor.....	4
C. Isu Strategis.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	7
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. PERENCANAAN KINERJA	7
A. VISI DAN MISI.....	7
B. TUJUAN DAN SASARAN	8
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	10
D. POGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	11
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	13
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	15
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.....	19
Sasaran 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	24
Sasaran 3: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	25
Sasaran 4 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	28
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	29
AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
BAB IV	33
PENUTUP	33
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024	9
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024	10
Tabel 3 Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2020	13
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020	14
Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja	15
Tabel 6 Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2019-2024	16
Tabel 7 Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 8 Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	19
Tabel 10 Daftar 29 inovasi yang diimplementasikan tahun 2020	22
Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	25
Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3	29
Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	27
Tabel 14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5	31
Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Kegiatan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

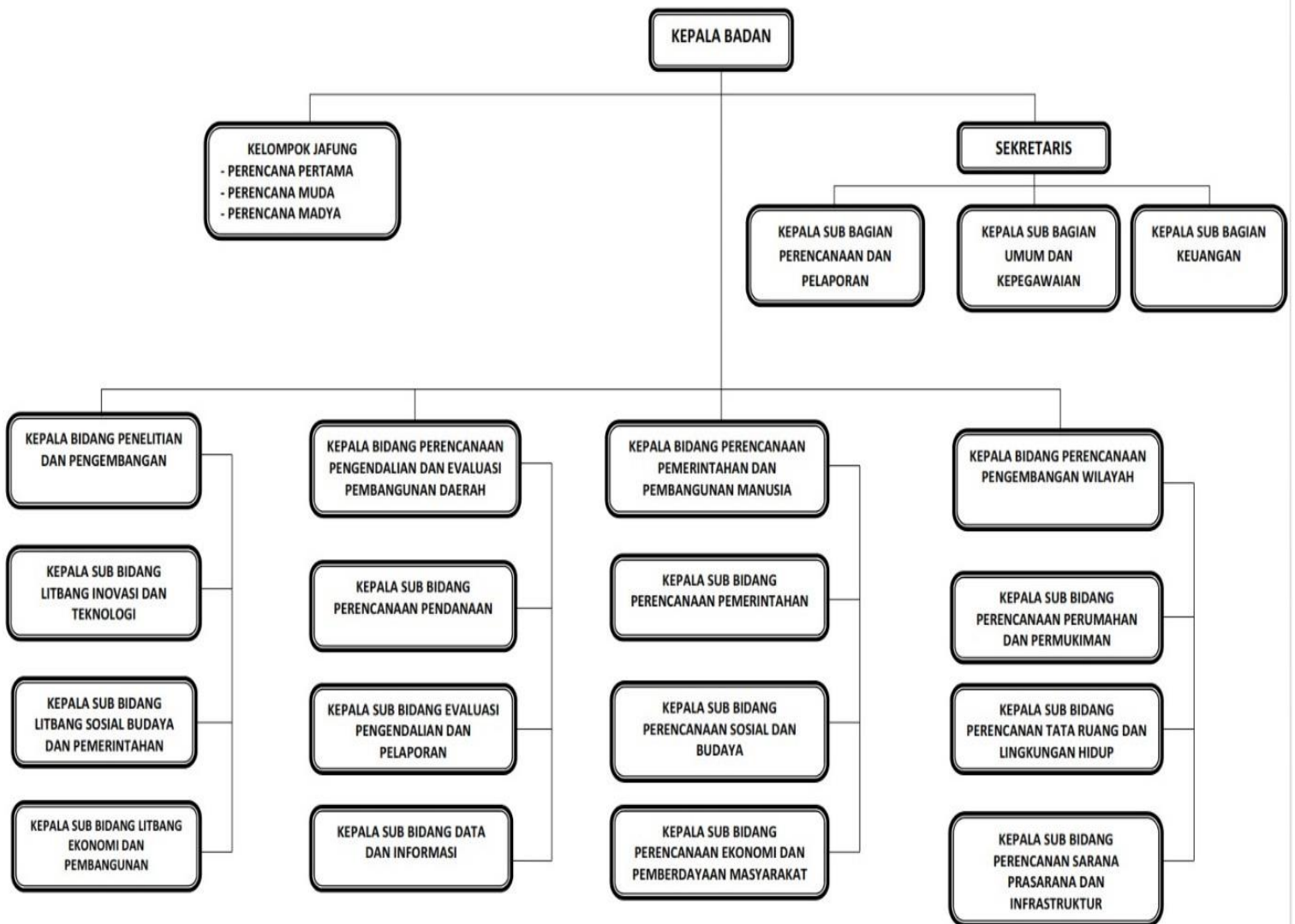
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian pengembangan pembangunan. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergitas dan berkelanjutan, Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor secara normatif di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan” daerah serta menjadi lini terdepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, professional dan bertanggungjawab sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat partisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor selalu menyerap informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan
 - 2) Sub Bidang Data Dan Informasi
 - 3) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
4. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor

Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor

1. Tugas Bappeda Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum optimal.
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektivitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya
 - a). Pembangunan daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.
 - b). Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil output.

D. Dasar Hukum

LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang; Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bogor;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;

E. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Gambaran umum Bappeda Kota Bogor
- b. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor
- c. Isu Strategis
- d. Dasar Hukum, serta
- e. Sistematika Penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Perjanjian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Evaluasi, dan Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

VISI merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai visi yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024 yang ingin dicapai Kota Bogor pada masa mendatang adalah :

“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Bappeda mendukung dalam mewujudkan Misi **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”** dan Misi **“Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”**

Dalam kaitannya Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional dan bertanggungjawab harus memenuhi beberapa syarat yaitu, Perencanaan Pembangunan yang **Berkelanjutan** artinya perencanaan pembangunan harus

memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik termasuk keberpihakan pada kesetaraan gender. **Partisipatif** : pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat **Profesional** : semua input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan **Bertanggungjawab** : proses perencanaan pembangunan harus terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam pengendalian.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ditetapkan untuk Visi dan Misi Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebanyak 4 Tujuan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan yang telah di tetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sebanyak 5 Sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran

Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator tujuan	Target indikator tujuan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah (Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri RI)	601-610
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat.	10

Tujuan	Indikator tujuan	Target indikator tujuan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22
Terwujudnya perencanaan tata Ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100

Tabel 1 Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	601-610
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5.2
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	6
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP BAPPEDA	B

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi yang ditetapkan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dalam RPJMD 2019-2024. Kebijakan yang ditetapkan adalah Teraplikasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	Pengelolaan rumah tangga OPD	1.777.936.180
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan inventaris kantor	515.850.000
			Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	654.920.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	170.075.000
4	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	22.036.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	211.482.800
		Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang		
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk		
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD		
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	24.443.500



No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
6	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	12.100.000
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.000.000
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Perencanaan Lingkungan Hidup	0
			Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman.	2.370.000
			Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	0
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Perencanaan Tata Ruang	192.935.000
			Pengembangan Informasi Geospasial	103.715.000
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	50.000
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	5.500.000
12	Program Penelitian Pengembangan	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Penguatan SIDA Kota Bogor	168.150.000
		Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Kajian Lingkup bidang Ekonomi	129.875.000
		Jumlah Hasil Kelitbang (angka)	Kajian Lingkup bidang Sosial budaya	176.226.000

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
		Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	Kajian Lingkup bidang Pembangunan	108.927.400

Tabel 3 Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Point	601-610
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	5.2
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	Rasio	6
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Persen	10
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	80



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP BAPPEDA	Nilai	B
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Persen	100

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Capaian (%)	Kategori	Realisasi	Keterangan
85 - 100	Sangat Baik	> Target	Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85	Baik	= Target	Tercapai
55 - <70	Cukup	< Target	Tidak Mencapai Target
<55	Kurang	> Target	

Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut :

Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator tujuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah (Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri RI)	601-610	5162
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat.	10	10
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistis, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	22,9
Terwujudnya perencanaan tata Ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	73,29

Tabel 6 Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2019-2024

Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	601-610	5162	583.178.400	554.010.100
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5.2	7		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	6	11	211.482.800	211.482.800
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10	10		
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23,35	108.143.500	97.912.000
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	65,57		
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP BAPPEDA	BB	BB	3.118.781.180	2.445.597.660
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	73,29	296.650.000	272.073.000

Tabel 7 Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) Indikator kinerja yang mencapai/melebihi target dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	601-610	5162	846,23	-	
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5.2	7	134,62	-	
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	6	11	183,33	-	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10	10	100	86	
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23,35	106,14	22,9	0,45
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	65,57	81,96	61,11	-1,11
4	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP BAPPEDA	B	BB	100	BB	
5	Meningkatnya Kualitas	Persentase Keselarasan	100	73,29	73,29	-	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
	Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD					

Tabel 8 Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2020

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	601-610	5162	846,23	-	5162
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5.2	7	134,62	-	7

Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Suber : Bidang Litbang

Cara perhitungan :

1. Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi(dasar : Penetapan oleh Kemendagri)
2. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100%

Sasaran 1 Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan sasaran penting dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Pada tahun 2020, inovasi masyarakat yang diimplementasikan sesuai dengan RPJMD 2019-2024 ada 29 inovasi. Inovasi berasal dari masyarakat dan Perangkat Daerah dalam menghadapi

pandemic covid-19. Salah satunya dari konsep new normal produktif dan aman covid-19, pada sektor pasar rakyat, pasar modern, sektor restoran, sektor wisata dan sektor hotel. Kota Bogor mendapat 4 penghargaan juara 1 untuk sektor pasar rakyat, pasar modern dan restoran serta juara 2 untuk sektor wisata konsep new normal produktif dan aman covid-19 dalam lomba yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Secara umum untuk setiap misi yang diimplementasikan dapat menunjang 1 atau lebih dari dua misi dalam RPJMD 2019-2024. Capaian inovasi yang dihasilkan dan diimplementasikan menunjang Visi Kota Bogor, yaitu “Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” sebanyak 29 inovasi yang diimplementasikan dengan rincian : 22 inovasi yang mengimplementasikan Misi 1 “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat”, untuk Misi 2 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas ada 12 inovasi, sedangkan untuk Misi 3 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera” ada 13 inovasi yang diimplementasikan. (daftar inovasi Tahun 2020 terlampir).

Daftar 29 Inovasi yang Diimplementasikan tahun 2020

NO	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMLEMENTASI
1.	New Normal Weeding Concept	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
2.	E-Invitation	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
3.	Reservasi Digital	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
4.	Tetap Produktif dengan AKB di Restorant Bumi Aki	Ekonomi	Restorant Bumi Aki	Misi 2, Misi 3
5.	Hangout New Normal Concept	Ekonomi	Rumah 30	Misi 2, Misi 3
6.	Aplikasi SMART	Perijinan	DPMPTSP	Misi 1, Misi 2, Misi 3



7.	Kujang Fresh	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
8.	Box Sanitizer UF-C	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
9.	QRIS Pembayaran Non Tunai Pasar Sukasari	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
10.	Bogor Kota Dalam Taman	Pariwisata	LIPI-Kebun Raya Bogor	Misi 2, Misi 3
11.	AKB di Lippo Plaza Ekalokasari	Ekonomi	Lippa Plaza Ekalokasari	Misi 2, Misi 3
12.	Si Kancil Berlari	Kependudukan	Disdukcapil	Misi 1, Misi 2
13.	Si Mang Pangeran	Perhubungan	Dishub	Misi 1, Misi 2
14.	Jaga Ada	Sosial	Walikota/DPPMPA	Misi 1, Misi 2
15.	Salur	Sosial	Walikota/Diskominfo	Misi 1, Misi 2
16.	Salur Gugus Tugas	Sosial	Walikota/Gugus Tugas	Misi 1, Misi 2
17.	Jejak	Kesehatan	Walikota/Diskominfo	Misi 1, Misi 2
18.	Detektif Covid	Kesehatan	Walikota/Diskominfo/D inkes/Kesra	Misi 1, Misi 2
19.	Inovasi Dashboard Covid	Pelayanan Publik	Gugus Tugas	Misi 1. Misi 2

20.	Inovasi Pantau Masjid	Kesehatan	Walikota/Diskominfi/B ag. Hukum	Misi 1, Misi 2
21.	Inovasi Pantau Mudik	Kesehatan	Diskominfo	Misi 1, Misi 2
22.	Pendidikan Berlandaskan Kasih Sayang	Pendidikan	Rifki, Guru SD Kaumsari	Misi 1, Misi 2
23.	SIMOTIP	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
24.	PB Online	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
25.	Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan Langsung	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
26.	Grha Tiyasa	Pelayanan Publik	DPMPTSP	Misi 1, Misi 2, Misi 3
27.	Si Pinter	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Misi 1, Misi 2
28.	Regulasi Kota Bogor Hadapi Covid	Hukum	Bag. Hukum	Misi 1, Misi 2, Misi 3
29.	Pa Caseb	Kesehatan	RSUD	Misi 1

Tabel 10 Daftar 29 inovasi yang diimplementasikan tahun 2020

Sumber : Kasubid Litbang inovasi dan teknologi

Realisasi pencapaian target tahun 2020 sebesar 846 % dari target yang harus dicapai berasal dari penilaian Nilai Indeks Inovasi daerah Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan jumlah nilai Indeks Inovasi Daerah 5.162, alasan mengapa realisasi pencapaian jauh lebih besar dari pada target yang ditetapkan karena pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 masih menggunakan perhitungan lama dan di

tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI menggunakan perhitungan baru untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah. Sehingga Kota Bogor berhasil mempertahankan predikat sebagai Kota Sangat Inovatif dengan jumlah inovasi yang diinput sebanyak 67 inovasi, sedangkan inovasi yang diverifikasi sebanyak 64 inovasi. Keberhasilan dari pencapaian target ini adalah adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan apresiasi terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat dalam bentuk pemberian penghargaan, dan dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi yang muncul serta adopsi inovasi untuk masyarakat. Indeks Penguatan Daya Saing Daerah yang dinilai oleh Kemenristek/BRIN juga mengalami kenaikan dari kategori sedang di zona kuning (5,68) menjadi kategori tinggi di zona hijau (2,91), urutan ketiga kategori kota di Jawa Barat.

Masalah yg semakin kompleks semakin sulit untuk diatasi karena berkaitan dengan banyak hal yang sering kali tidak terduga. Masalah yg semakin kompleks, harus dipahami secara berhati-hati dan harus ditangani secara berhati-hati. Oleh karena itu penyelesaian masalah melalui berbagai kebijakan yg dibuat tidak dapat lagi hanya didasarkan atas kekuasaan, tradisi atau common sense. Pemerintah maupun pemerintah daerah dipaksa untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut secara ilmiah. Yang dimaksud secara ilmiah adalah perencanaan & rumusan kebijakan publik didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya banyak penelitian dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah yang pada hakekatnya diperuntukkan bagi pembuatan kebijakan, sebagai bagian dari pemecahan masalah (Problem solving) yang ada. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah. Bappeda Kota Bogor sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem solving. Pada tahun 2020 terdapat 117 hasil kelitbangan yang di inventarisasi oleh bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Bogor, dari seluruh hasil kelitbangan yang di inventarisasi terdapat 9 yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

Dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 583.178.400,- yang di jabarkan melalui program penelitian dan pengembangan, mengutamakan hasil capaian yang optimal sesuai dengan target yang di tetapkan melalui belanja dalam kegiatan telah dilakukan efisiensi anggaran tetapi sasaran tetap tercapai.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja adalah dengan melibatkan banyak stakeholder (Badan Litbang, Dunia Pendidikan, Masyarakat, Perangkat Daerah, Peguruan Tinggi, Bisnis, Komunitas dan Media) melalui sosialisasi secara lebih intens dan keterlibatan yang baik dalam upaya membina dan memfasilitasi inovasi. Tahun 2020 Bappeda mulai bergabung dengan Himpenindo Wilayah Kota Bogor (Himpunan Peneliti Indonesia) guna membentuk jejaring peneliti untuk memudahkan koordinasi, penerapan dan diseminasi. Selain itu, Tahun 2020 dua orang staf Bappeda telah lulus mengikuti Diklat Fungsional Peneliti sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan SDM Bappeda

Sasaran 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	6	11	183,33	-	11
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10	10	100	86	-76

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Sumber : Kabid PPEPD

Cara perhitungan :

1. Jumlah Masyarakat yang hadir dalam Musrenbang dibagi 10.000 dikali jumlah penduduk kota bogor
2. Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir di bagi jumlah anggaran di x 100%

Dalam Proses Perencanaan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Peran masyarakat bukan sebagai objek saja tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Semangat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota di Kota Bogor masih tinggi, ini dapat dilihat dari tercapainya target indikator rasio keterwakilan masyarakat dalam musrenbang, dari 10.000 masyarakat yang hadir dalam musrenbang sebanyak 11 masyarakat .

Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran

dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD merupakan salah satu Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran RPJMD secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap realisasi capaian kinerja pembangunan daerah. Pada tahun 2020 usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD sebesar 10%, pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD tahun 2019-2024.

Sasaran 3: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23,35	106,14	22,9	0,45
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	65,57	81,96	61,11	-1,11

Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Sumber : Bidang PPEPD

Cara perhitungan :

1. Nilai hasil evaluasi perencanaan atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
2. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100%

Tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pengambilan

kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, dalam rangka mendukung hal tersebut perlu adanya reformasi perencanaan dan penganggaran. Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran harus memperlihatkan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, oleh karena itu sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan serta evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pencapaian kinerja perencanaan dan pembangunan sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD.

Sesuai penilaian SAKIP tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai 73,75 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Bogor menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Penilaian SAKIP Kota Bogor Tahun 2020

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,35
2	Pengukuran Kinerja	25	18,49
3	Pelaporan Kinerja	15	11,88
4	Evaluasi Kinerja	10	7,39
5	Capaian Kinerja	20	12,64
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan, efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan berdasarkan Indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra PD dan RPJMD, selain itu. Evaluasi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana, pelaksanaan rencana maupun setelah kebijakan/program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu 65,57%, terdapat beberapa kendala yang dialami dalam mencapai target indikator kinerja diantaranya terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia membuat kebijakan untuk menangani percepatan penanganan Covid-19, dimana Pemerintah

Pusat bersama seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu *refocusing* dan relokasi anggaran, serta melakukan perhitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Secara signifikan dampak Covid-19 terjadi pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi melambat
2. Peningkatan pengangguran
3. Peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas
4. Angka Kemiskinan naik
5. Rawan pangan
6. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat
7. Penurunan kontribusi dari sector pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi
8. Inflasi meningkat
9. Pembangunan infrastruktur terhambat

Sementara Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pada tahun 2020, sebagai berikut :

1. Minimnya bimbingan teknis yang diselenggarakan dari pusat terkait implementasi pemantauan, pengendalian dan evaluasi sehingga terkadang tidak bisa menjawab permasalahan teknis yang muncul di lapangan ketika daerah menerapkan ke Perangkat Daerah.
2. Laporan dari perangkat daerah yang tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaporan evaluasi

Untuk memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan, maka perencanaan pembangunan daerah tahunan kota Bogor tahun 2021 harus sinergis dan selaras dengan arah pembangunan daerah propinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan arah pembangunan Nasional Tahun 2021 yang di fokuskan pada :

1. Pemulihan dan penguatan pertumbuhan sector Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani dalam rangka reformasi sosial
3. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan melayani

Sasaran 4: Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan / Penurunan
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP BAPPEDA	B	BB	100	BB	

Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

Cara perhitungan :

1. Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat

Tatakelola Pemerintahan yang baik adalah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 oleh Inspektorat Kota Bogor, bahwa Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memperoleh nilai 74,09 atau predikat BB, dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi sebagai berikut :

Tabel Rincian Penilaian LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	29,94
2	Pengukuran Kinerja	25	21,88
3	Pelaporan Kinerja	15	10,79
4	Evaluasi Kinerja	10	6,20
5	Capaian Kinerja	20	5,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

Dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.118.781.180,- yang di jabarkan melalui program penelitian dan pengembangan, mengutamakan hasil capaian yang optimal sesuai dengan target yang di tetapkan melalui belanja dalam kegiatan telah dilakukan efisiensi anggaran tetapi sasaran tetap tercapai

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja	Capaian tahun 2019	Kenaikan / Penurunan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	73,29	73,29	-	

Tabel 14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

Sumber : Kabid PPW

Cara perhitungan :

1. Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bagi jumlah seluruh rencana pemanfaatan ruang x 100%

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/Kota, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsi Pencanaan Penataan Ruang Wilayah adalah sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota.



6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Pada tahun 2020 data rekapitulasi pencapaian Pola ruang sebesar 97,84% dan rekapitulasi pencapaian Struktur Ruang sebesar 48,76%, dilihat dari realisasi ketercapaian tersebut maka masih terdapat ketidak selarasan antara rencana pemanfaatan ruang dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dari hasil perhitungan pada tahun 2020 keselarasan rencana pemanfaatan ruang di Kota Bogor baru mencapai 73,29%, hal ini akan menjadi catatan Bappeda untuk tahun berikutnya agar dapat menyusun rencana untuk mendorong ketercapaian target keselarasan sesuai yang direncanakan dalam RPJMD sebesar 100%

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Bogor dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Pagu belanja langsung Bappeda Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.318.235.880.- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.582.003.560.- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 82.95 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kota Bogor pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2020**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
1)	Belanja Tidak Langsung	12.065.358.946	9.858.300.051	81,71%
1	Gaji dan Tunjangan	12.065.358.946	9.858.300.051	81,71%
2)	Belanja Langsung	4.318.235.880	3.582.003.560	82,95%
1	Perencanaan Tata Ruang	192.935.000	172.427.000	89,73%
2	Pengembangan Informasi Geospasial	103.715.000	99.646.000	96,08%
3	Koordinasi Penyelenggaran TJSL/CSR	22.036.000	17.236.000	78,22%
4	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	12.100.000	12.100.000	100%
5	Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	211.482.800	211.482.800	100%
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	24.443.500	23.393.000	95,70%
7	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.000.000	928.000-	92,80%
8	Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0%
9	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	2.370.000	2.370.000	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
10	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	0	0	0%
11	Penyusunan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	46.144.000	42.763.000	92,67%
12	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	50.000	50.000	100%
13	Penguatan SIDA Kota Bogor	168.150.000	147.635.500	87,80%
14	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	129.875.000	129.685.000	99,85%
15	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	176.226.000	169.622.200	96,25%
16	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	108.927.400	107.067.400	98,29%
17	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	170.075.000	167.910.000	98,73%
18	Pengelolaan Rumah Tangga PD	1.777.936.180	1.282.098.810	72,11%
19	Pengadaan Inventaris Kantor	515.850.000	514.450.350	99,73%
20	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	654.920.000	481.138.500	73,47%
JUMLAH		16.383.594.826	13.440.303.611	82,03%

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor sampai dengan bulan Desember 2020 bahwa capaian seluruhnya adalah 82.03% termasuk ke dalam kategori BAIK atau dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan target.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor bulan Januari 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum telah tercapai sesuai target dan tercapai melebihi target Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 16.383.594.826.- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) realisasi sebesar Rp. Rp. 13.440.303.611.- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 82.03%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra-PD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan kritikal point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan PD yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.

Bappeda menggunakan indikator kinerja hasil Reviu Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor memiliki 5 sasaran dan 8 indikator yang ditetapkan yaitu:

SASARAN :

1. Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Tatakelola Bappeda yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah

INDIKATOR :

1. Indeks Inovasi Daerah.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
3. Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000.
4. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD.
5. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota.
6. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target.
7. Nilai AKIP BAPPEDA.
8. Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan Sumber Daya Manusia , maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2020 Dalam dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran-sasaran strategis untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2020, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Selain beberapa capaian indikator kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

- Kendala dalam mengatur jadwal wawancara dengan Perangkat Daerah Kota Bogor dan instansi vertikal dikarenakan pandemi COVID-19;
- Kendala dalam mengatur jadwal Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah dan masyarakat;
- Pelaksanaan Musrenbang Kota Bogor direncanakan sesuai dengan jadwal, tetapi pelaksanaannya terhambat karena Pandemi Covid 19, sehingga proses perencanaan Musrenbang Tingkat Kota Tahun 2020 yang seharusnya dilaksanakan dengan tatap muka menjadi virtual /online;
- Masyarakat/Peserta Musrenbang Kelurahan belum memahami sepenuhnya mekanisme pengusulan kegiatan melalui Aplikasi;

- Usulan kegiatan belum menunjukkan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan/masih bersifat usulan yang rutin;
- Dengan adanya Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Pusat menginstruksikan agar semua Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran, berdampak pada pengurangan anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dari anggaran sebesar Rp. 71.181.000 menjadi 24.443.500,- sehingga output dari kegiatan pun mengalami perubahan/pengurangan, salah satunya untuk cetak buku RKPD Tahun 2021 yang sebelumnya di rencanakan sebanyak 55 buku, hanya dapat tercetak 10 Buku;
- Adanya regulasi PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengakibatkan Perangkat Daerah harus melakukan pemetaan kembali nomenklatur kegiatannya;
- Masih ada beberapa PD mitra kerja Bidang Sosial Budaya yang menghadapi kesulitan dalam mengisi data matriks kegiatan (target dan capaian indikator kinerja program serta output kegiatan) sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
- Pemahaman tentang Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan antar PD belum sama;
- Masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya inovasi di wilayah khususnya sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor;
- Masih terdapat Perangkat Daerah yang kesulitan menginput data;
- SDM khusus Pengelola Data di Perangkat Daerah belum ada;
- Belum ada mekanisme rewards punishment tentang data;
- Proposal belum dilengkapi dengan gambar Detail Engineering Design (DED);
- Proposal belum dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Proposal yang diajukan pada akhir tahun anggaran (tutup buku) pelaku usaha, sehingga tidak bisa direalisasikan pada tahun pengajuan tetapi menunggu tahun selanjutnya;
- Proposal dari masyarakat belum dilengkapi dengan surat pengantar dari Perangkat Daerah yang memverifikasi usulan tersebut;
- Minimnya bimbingan teknis yang diselenggarakan dari pusat terkait implementasi pemantauan, pengendalian dan evaluasi sehingga terkadang tidak bisa menjawab

permasalahan teknis yang muncul di lapangan ketika daerah menerapkan ke Perangkat Daerah;

- Laporan dari perangkat daerah yang tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaporan evaluasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada PD (*need assessment*);
- Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta memfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan;
- Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan; dan
- Mengoptimalkan aplikasi SIPD pada seluruh PD pada lingkungan Pemerintah Kota Bogor.